



PENETAPAN

Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IIYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK.1108170107760199, tempat dan tanggal lahir, Buket Selamat, 01 Juli 1976, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun Baroh Gampong Alue seumambu Kecamatan xxx xxxxx Kabupaten xxxx Utara, sebagai Pemohon I;
dan

PEMOHON 2, NIK.1108174107710137, tempat dan tanggal lahir, xxx xxxxxxxx, 01 Juli 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Dusun Baroh Gampong Alue seumambu Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Maulina, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, pada kantor hukum MA LAW OFFICE, beralamat di Jalan Medan Banda xxxx, Teupin Punt, xxxx Utara, Telp.+6282276138329, Email maulinajamil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 33/SK/MA/PDT/VI/2024 Tanggal 03 Juni 2024, sebagai Para Pemohon;

Hal 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Juni 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk, tanggal 25 Juni 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II (Para Pemohon) merupakan suami istri, yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada hari Senin tanggal 12 April 1999 Masehi, demikian menurut Kutipan Akta Nikah Nomor: 067/67/IV/1999 bertanggal 12 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa para Pemohon merupakan orang tua yang merupakan ayah kandung dan Ibu sambung dari: Fitri Yana binti M Nasir Y, NIK.1108246006060001, tempat dan tanggal lahir, Gampong U Baro, 20 Juni 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, status perkawinan: belum kawin/gadis, pekerjaan ex pelajar, tempat tinggal di Dusun Dusun Baroh Gampong Alue seumambu Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuan kandung Para Pemohon, bernama: Fitri Yana binti M Nasir Y, NIK.1108246006060001, tempat dan tanggal lahir, Gampong U Baro, 20 Juni 2006, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SMP, status perkawinan: belum kawin/gadis, pekerjaan ex pelajar, tempat tinggal di Dusun Dusun Baroh Gampong Alue seumambu Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx; dengan calon suaminya, bernama:
 - Riski Andrika bin Hasballah S, NIK.1108170104980003, tempat dan tanggal lahir, Buket Seulamat, 01 april 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMP, status perkawinan:

Hal 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



belum kawin/lajang, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Ule
Kuta Gampong Trieng, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
Perkawinannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia perkawinan bagi anak perempuan kandung Para Pemohon yang baru berumur 18 tahun, sehingga belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami atau calon isteri sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samudera xxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: B-0121/kua. 01.06/17/pw.01/05/2024 bertanggal 30 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

5. Bahwa antara anak perempuan kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap perkawinan mereka;

6. Bahwa anak perempuan kandung Para Pemohon berstatus belum kawin/gadis, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami anak perempuan Para Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada masyarakat atau pihak ketiga maupun pihak-pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;
8. Bahwa antara anak perempuan kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah kenal lama dan telah bertunangan selama 1 (satu) tahun lamanya dan akan melangsungkan perkawinan setelah lebaran idul adha;
9. Bahwa Para Pemohon memohon agar permohonan dispensasi nikah ini dikabulkan seluruhnya, sebagai syarat untuk dapat segera menikahkan anak perempuan kandung Para Pemohon dengan calon suaminya, oleh karena hubungan antara anak perempuan kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa eratnya, dan telah sepakat untuk menjalin hubungan yg lebih erat dengan melangsungkan pernikahan, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
10. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Dispensasi Nikah dari Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak perempuan Para Pemohon, bernama: - Fitri Yana binti M Nasir Y, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami, bernama: - Riski Andrika bin Hasballah S;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u :

Hal 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin (calon isteri), dan atas pertanyaan Hakim, calon isteri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri bernama Fitri Yana binti M Nasir Y;
- Bahwa calon isteri sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon suami yang bernama Riski Andrika bin Hasballah S;
- Bahwa baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat hubungan maupun perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon isteri dan calon suami tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon isteri dan calon suami sama-sama saling suka;
- Bahwa calon suami dan keluarganya telah meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon suami telah bekerja, namun calon isteri tidak tahu berapa penghasilannya;

Hal 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa orang tua calon suami sudah tahu calon isteri belum berumur 19 tahun, namun orang tua calon suami tidak keberatan dan menerima kondisi calon isteri;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon bernama **Riski Andrika bin Hasballah S**, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri saya bernama **Fitri Yana binti M Nasir Y**;
- Bahwa calon suami sudah siap lahir dan bathin untuk menikah dengan calon isteri;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga calon suami sudah meminang calon isteri dan diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon suami sangat mencintai calon isteri;
- Bahwa calon suami siap bertanggungjawab terhadap kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Bahwa calon suami telah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa, Para Pemohon telah pula menghadirkan paman calon suami bernama Sya'bi Bin Usman, umur 43 tahun, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Tgk. Chik Diminje, Gp. Lhok Reuhut, Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dan atas pertanyaan Hakim, keluarga calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami telah mengenal calon isteri dan orang tua calon isteri (Para Pemohon);
- Bahwa hubungan orang tua kandung dan keluarga besar calon suami dengan calon isteri dan keluarganya berjalan baik;
- Bahwa menurut keterangan calon suami kepada orang tua kandung calon suami, calon isteri masih di bawah umur, namun baik calon isteri maupun calon suami telah bersepakat untuk menikah;

Hal 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa di mata orang tua kandung calon suami serta pihak keluarga, calon isteri sudah siap mendampingi calon suami untuk hidup berumah tangga meskipun masih di bawah umur;
- Bahwa calon suami dan calon isteri tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan keluarga besar sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa orang tua kandung calon suami dan keluarga siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan calon isteri dan calon suami setelah menikah nanti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK. 1108170107760199, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan nazegele, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK. 1108174107710137, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Utara, yang telah bermaterai cukup dan nazegele, serta cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0039/008/IV/2015, an. Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegele, serta cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I, Nomor: 1108171611060729, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegele, serta cocok dengan aslinya (P.4);

Hal 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon isteri NIK. 1108246006060001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. calon isteri Nomor: 1108-LT01092014-0023, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxx, bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah an. calon isteri tertanggal 05-06-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta Benih Bangsa, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon NIK. 1108170104980003, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.8);
9. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah/ Rujuk Nomor: B-0121/kua.01.06/17/pw.01/05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, yang telah bermaterai cukup dan nazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.9);

B. Saksi:

1. Syamsudin Bin M. Nur, saksi adalah Geuchik pada gampong Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
 - Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;

Hal 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedarrah maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

2. Tgk. Muhammad Zaini Bin Usman, saksi adalah tgg. Imum di gampong Para Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, calon isteri dan calon suami;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik calon isteri maupun calon suami telah sepakat berumah tangga dengan restu dari keluarga masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut terkendala karena umur calon isteri belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa menurut pengamatan saksi, meskipun calon isteri belum cukup umur untuk menikah, namun calon isteri sudah siap untuk berumah tangga;

Hal 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



- Bahwa sepengetahuan saksi, antara calon suami dan calon isteri tidak ada kendala melangsungkan pernikahan seperti sedaroh maupun terikat perkawinan dengan yang lain;
- Bahwa calon suami dan calon istri tidak ada dipaksa oleh orang tua atau keluarganya untuk menikah;
- Bahwa calon suami dan calon istri telah lama kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah melamar calon isteri dan sudah diterima oleh calon isteri dan keluarganya;
- Bahwa calon istri saat ini berstatus gadis dan calon suami berstatus lajang;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bertunangan dan telah menetapkan tanggal pernikahannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan oleh anak di bawah umur dengan

Hal 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan untuk menunggu sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berhak mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orangtua/ wali dari calon isteri, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hal (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah memenuhi syarat dan ketentuan surat kuasa sebagaimana aturan yang berlaku dalam Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu pemberian kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan sah di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi (calon isteri), calon suami

Hal 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan orang tua/ wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon (P.1 s.d. P.9) telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 merupakan identitas Para Pemohon dan surat biodata calon isteri (anak Para Pemohon) memberi bukti bahwa Para Pemohon dan calon isteri bertempat tinggal di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Lhoksukon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan KTP an. calon suami membuktikan bahwa calon suami telah mencapai umur minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan pemberitahuan kekurangan syarat membuktikan bahwa keinginan calon isteri untuk menikah telah ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi

Hal 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya saling bersesuaian yang menerangkan bahwa keinginan calon isteri dan calon suami untuk menikah telah direstui keluarga masing-masing, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan calon isteri dengan calon suami sudah berencana untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan calon isteri belum berusia 19 tahun;
- Bahwa, baik calon isteri maupun calon suami sama-sama tidak terikat perkawinan dengan yang lain dan tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon isteri sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun calon isteri belum berumur 19 tahun, akan tetapi calon isteri dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa calon isteri dengan calon suami sudah menjalin hubungan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus

Hal 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan calon isteri dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim menilai sebagian masyarakat xxxx yang akan menikahkan anaknya telah melakukan atau menetapkan tanggal pernikahan anak Para Pemohon sebelum adanya izin dari Pengadilan/Mahkamah, dan hasil kesepakatan tersebut telah diumumkan kepada masyarakat di tempat tinggal Para Pemohon, sehingga Hakim menilai seandainya permohonan Para Pemohon ditolak, maka kesepakatan yang telah dilakukan oleh Para Pemohon dengan keluarga calon suami dari anak Para Pemohon tetap dilaksanakan, sehingga ditakutkan tindakan Para Pemohon mengakibatkan terjadinya pernikahan siri, sehingga anak Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan hukum layaknya seorang istri disebabkan tindakan Para Pemohon yang menikahkan anaknya tanpa dicatatkan di KUA setempat. Oleh karenanya Hakim menilai, untuk menghalang tindakan Para Pemohon maka sebaiknya anak Para Pemohon diberikan izin untuk menikah dan mencatatkan pernikahannya pada KUA setempat;

Hal 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

المصالح جلب من

المفاسد أولى درأ

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fitri Yana binti M Nasir Y untuk menikah dengan calon suaminya bernama Riski Andrika bin Hasballah S;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Ismail, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama dengan dibantu oleh **Anshari Utama, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para

Hal 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Pemohon secara elektronik;

Hakim

Ismail, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Anshari Utama, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk



Hal 18 dari 16 halaman Penetapan Nomor 366/Pdt.P/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)